

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM DI KAWASAN METROPOLITAN SARBAGITA

Putu Ratih Oka Wardani¹
I Ketut Sutrisna²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail : ratihokawardani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) salah satunya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat disegala lapisan. Pada tahun 2009 pemerintah Provinsi Bali mencanangkan sebuah program yaitu kawasan metropolitan SARBAGITA. Pada kawasan SARBAGITA pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun mengalami fluktuatif dan belum dapat sejalan dengan perkembangan kesejahteraan masyarakatnya. Ketimpangan tersebut dapat menjadi sebuah masalah dalam mewujudkan kawasan SARBAGITA sebagai kawasan metropolitan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai : 1) untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kawasan metropolitan SARBAGITA. 2) untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kawasan metropolitan SARBAGITA. 3) untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan investasi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kawasan metropolitan SARBAGITA. Teknik analisis menggunakan analisis jalur dan hasil penelitian kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah dan investasi tidak berpengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan. Kemandirian keuangan daerah dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : *kemandirian keuangan daerah, investasi, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat*

ABSTRACT

One goals on Sustainable Development Goals (SDG's) is Public Welfare. In 2009 Bali Province launched a program SARBAGITA metropolitan area. In the SARBAGITA area, economic growth from year to year are fluctuated and has not in line with the development of people's welfare that causing inequality in every SARBAGITA area. Inequality in SARBAGITA area can be a problem in realizing the SARBAGITA area as a metropolitan area. The reserch objective to be analyze the effect of regional financial independence and investment on economic growth, analyze the influence of regional financial independence, investment, economic growth on the welfare and analyze the influence of regional financial independence and investment through economic growth on the welfare of the community in the SARBAGITA metropolitan area. The analysis technique uses path analysis and the results of research on regional financial independence have a significant negative effect on economic growth while investment has a significant positive effect. The independence of regional finance and investment have no a direct effect on public welfare, while economic growth has a significant positive effect. Independence of regional finance and investment has an indirect effect on people's welfare through economic growth.

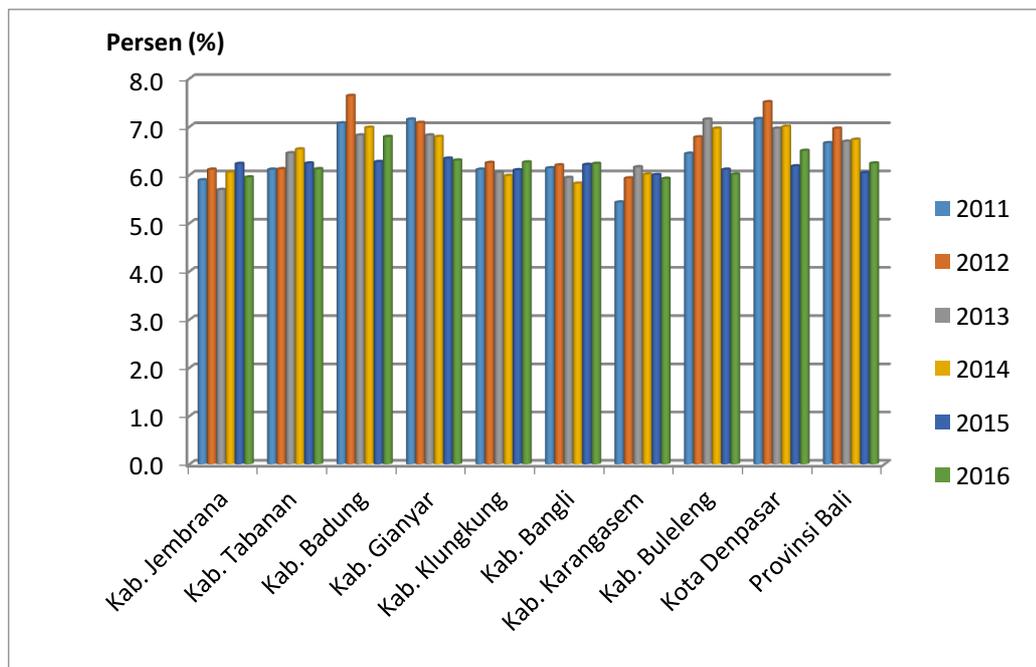
Keywords: *economic growth, community welfare, regional finance, investastion*

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDG's) sebagai salah satu program dalam menyongsong perbaikan pembangunan ekonomi memiliki lima pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan (Wahyuningsih, 2017). Tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus utama pada program ini yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi (Pisano *et al*, 2015). Hal ini berarti dunia bersepakat untuk berfokus pada tiga ruang lingkup tersebut salah satunya mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang baik (Ishartono dan Raharjo, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang baik ini dapat tercipta di setiap daerah salah satunya yaitu Provinsi Bali. Pada saat ini pemerintah daerah diberikan otonomi dimana pada hakekatnya pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk memilih cara-cara pengembangan daerahnya sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang ada dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Wiagustini, 2017).

Zouhaier (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memberikan angin segar terhadap kesejahteraan daerah. Desentralisasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi (Miranti *et al.*, 2014). Pemerintah daerah dapat membantu pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang diberikan (Dalamagas *et al*, 2010). Melalui kontribusi PAD pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercipta sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Kusuma, 2016).

Perda Nomor 16 tahun 2009 mengenai rencana tata ruang wilayah, salah satunya adalah kawasan metropolitan SARBAGITA. Kawasan SARBAGITA yang berfungsi sebagai sistem Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perkotaan Bali Selatan, dengan pusat pelayanan kawasan perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (SARBAGITA). Kawasan perkotaan metropolitan dituntut untuk mampu berfungsi secara efektif sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang efisien sehingga dapat menunjang upaya percepatan pembangunan regional, nasional bahkan internasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2017)

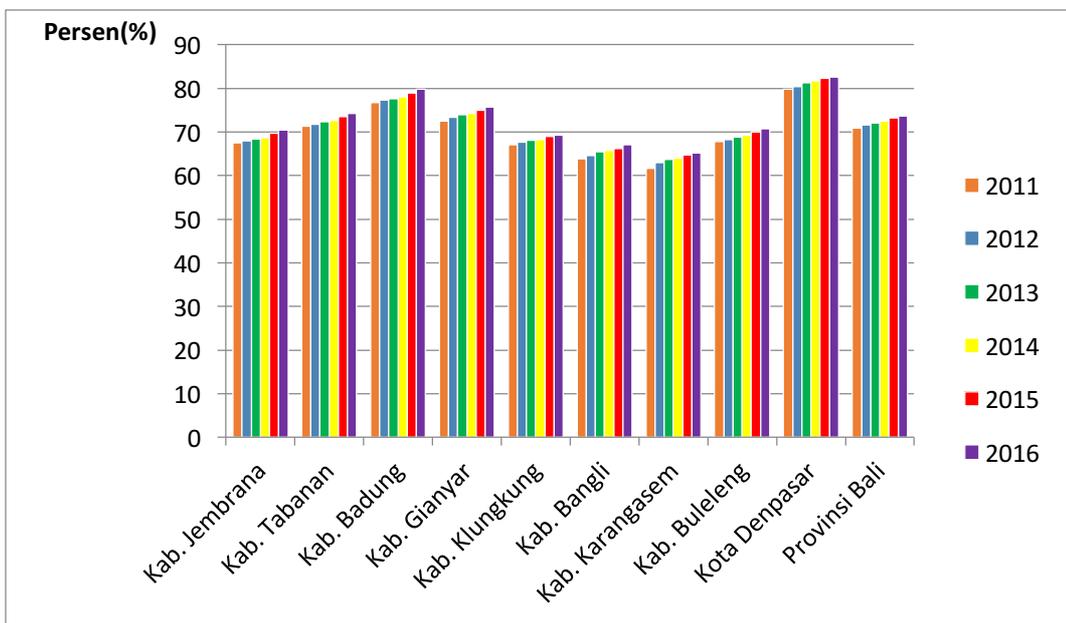
Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2016 (Persen)

Gambar 1 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar yaitu sebesar 6,88 persen, Kabupaten Badung sebesar 6,92 persen, Kabupaten Gianyar sebesar 6,74 persen, dan Kabupaten Tabanan sebesar 6,26

persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017). Laju pertumbuhan ini cenderung sudah berada diatas rata-rata laju pertumbuhan Provinsi Bali dalam kurun waktu 2011-2016 hanya mencapai angka sebesar 6,56 persen, namun dalam kurun waktu dua tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan. Wilayah SARBAGITA yang seharusnya dapat menjadi wilayah berintegrasi dan wilayah percontohan bagi kabupaten lain masih mengalami permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya peran pertumbuhan wilayah pada kawasan metropolitan SARBAGITA sehingga dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan menuju kesejahteraan pada masyarakatnya. Menurut Kaur (2016) bukan hanya perkembangan teknologi dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dapat dicerminkan melalui pembangunan sosial ekonomi yang diharapkan dapat terwujud melalui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (Akudugu,2012). Hal ini dicerminkan melalui berkurangnya penduduk miskin karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik (Yanthi dan Marhaeni, 2015).

Human capital yang diukur melalui indikator kesejahteraan masyarakat tersusun dari tiga indikator tunggal yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017). Hariwan dan Swaningrum (2015) menyatakan bahwa *Human Development Index* (HDI) telah diterima secara luas sebagai ukuran perkembangan manusia dimana angka IPM berkisar antara 0 sampai 100, semakin mendekati 100 maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan

manusia yang semakin baik (Rustariyuni ,2014). Maccari (2014) dalam hasil penelitiannya untuk memberikan gambaran perkembangan sosial dan ekonomi dari sumber daya manusia yang ada di suatu daerah dapat ditunjukkan melalui besaran IPMnya. Pradnyadewi (2017), Kacaribu (2013), Garibaldi dan Paidi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2017)

Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 - 2016 (Persen)

Bila dilihat dari tingkat IPM masing-masing wilayah SARBAGITA rata-rata sudah berada diatas Provinsi Bali, dimana Kota Denpasar memiliki angka IPM sebesar 82,58 persen, Kabupaten Badung sebesar 79,8 persen, Kabupaten Gianyar sebesar 75,7 persen dan urutan terakhir Kabupaten Tabanan sebesar 74,19 persen, namun tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang berbeda ini dapat menyebabkan adanya ketimpangan antar wilayah (Ali dkk, 2013). Hingga saat ini,

ketimpangan antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat (Irawan, 2015). Tingkat ketimpangan antar daerah yang diukur melalui IPM dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial merupakan suatu proses pertumbuhan di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model pembangunan yang satu atau lainnya (Antonescu, 2010).

Kesejahteraan adalah tujuan proses pembangunan dengan menguatkan karakter manusia melalui dibidang pendidikan dan pelatihan akan dapat menambah nilai ekonomi manusia tersebut dengan kata lain meningkatkan kualitas modal manusia (Bendes, 2014). Tingkat IPM yang sangat baik tersebut seharusnya mencerminkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ranis (2004) bahwa ada hubungan positif yang kuat di kedua arah dan pengeluaran publik untuk pelayanan sosial dan pendidikan menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi dan IPM yang terjadi pada kawasan SARBAGITA belum menunjukkan hubungan yang positif dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi ini belum sejalan dengan perkembangan tingkat IPM yang sangat baik. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap wilayah memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengelola keuangan daerahnya, sehingga jika semakin tingginya tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka daerah tersebut akan semakin mudah dalam mendorong pertumbuhannya dan dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik.

Kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga digunakan untuk menanggulangi

pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik. Terfokus di kawasan metropolitan SARBAGITA, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Denpasar sebesar 36,34 persen, Kabupaten Badung 77,65 persen, Kabupaten Gianyar 27,13 persen, dan Kabupaten Tabanan 28,33 persen (BPS Provinsi Bali,2018). Salih (2012) menyatakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, hal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaannya yang harus tepat sasaran. Pemerintah daerah seharusnya dapat memberdayakan keuangan daerahnya dengan baik guna menunjang kesejahteraan masyarakatnya sehingga tercipta pertumbuhan yang baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selain dengan pemanfaatan kemandirian keuangan daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tentu perlu adanya bantuan dari pihak-pihak lain selain pemerintah daerah agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Peran investor baik dalam negeri ataupun luar negeri, sangatlah besar guna menunjang perbaikan infrastruktur suatu daerah, sehingga dapat membantu pemerintah menyongsong pertumbuhan ekonomi yang baik.

Investasi yang diberikan pada investor utamanya untuk menunjang pembangunan cenderung fluktuatif di setiap daerahnya. Kurun waktu 2011-2016, memperlihatkan daerah SARBAGITA mengalami perkembangan investasi yang fluktuatif. Namun, untuk tahun 2016 investasi diseluruh kawasan SARBAGITA mengalami penurunan yang cukup drastic (BPS Provinsi Bali,2018). Hal ini terjadi akibat adanya isu bencana alam yang terjadi, yang menyebabkan keinginan para investor dalam menanamkan modalnya mulai menurun. Hal ini juga berdampak

pada kawasan SARBAGITA meskipun kawasan ini sudah terbilang maju tetapi dorongan dari investor juga diperlukan untuk menunjang keuangan daerah dalam melaksanakan perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang ada. Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya untuk menarik kembali para investor melalui pemanfaatan keuangan daerah, sehingga dapat membantu perbaikan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Membaiknya investasi yang ada di suatu daerah akan membangkitkan segala pembangunan dan perekonomian yang ada sehingga dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang baik dan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Investasi yang diberikan pada investor utamanya untuk menunjang pembangunan cenderung fluktuatif di setiap daerahnya. Membaiknya investasi yang ada di suatu daerah akan membangkitkan segala pembangunan dan perekonomian yang ada sehingga dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang baik dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di suatu daerah yaitu, potensi sumber daya alam yang menarik, kondisi lingkungan sekitar seperti infrastruktur, pendidikan serta angka korupsi di suatu daerah (Lindblad, 2015). Namun Fleisher *et al.* (2010) mengatakan bahwa, investasi dapat menjadi salah satu faktor penentu kesenjangan antar wilayah. Dengan alasan tersebut, maka investasi merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kawasan metropolitan SARBAGITA.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada kawasan metropolitan SARBAGITA.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan investasi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada kawasan metropolitan SARBAGITA.

METODOLOGI PENULISAN

Konsep penelitian ini menganalisis tentang kesejahteraan masyarakat kawasan metropolitan SARBAGITA. Beberapa faktor seperti kemandirian keuangan daerah dan investasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat diketahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang gambarkan dengan angka IPM dalam satuan persen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah keuangan daerah dan investasi. Variabel intervening yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen yang berada di kawasan SARBAGITA.

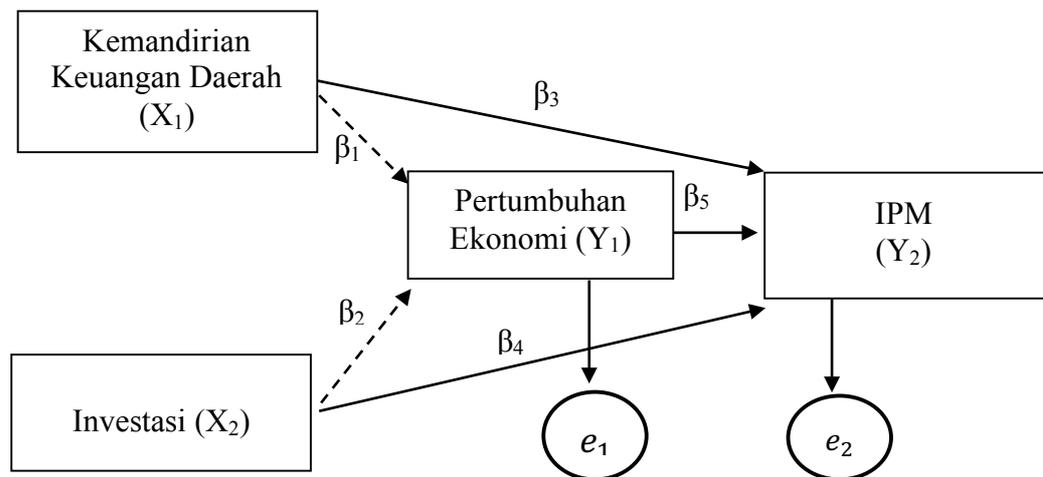
Kemandirian keuangan daerah diidentifikasi melalui perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah dikali 100% dimana akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam satuan persen. Hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki

hubungan yang positif signifikan yang dijelaskan dengan hasil penelitian Ani (2014), Sari (2017) dan Kusuma (2016). Pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewi dan Sutrisna (2014), Amalia dan Purbadharmaja (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik tidak hanya berasal dari tingkat kemampuan daerah itu sendiri, dapat juga di dukung dari pihak eksternal seperti investor. Investasi pada berbagai sektor akan dapat mempercepat pembangunan dan akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sholilah (2014), Paramita (2015), Danawati (2016), dan Taufik,dkk (2014), menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa investasi memberikan dampak yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi pendidikan akan menghasilkan pertumbuhan yang berkeadilan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam penelitian Sulistyowati.,dkk (2010) dan Suciati (2015) menunjukkan hubungan yang positif antara investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

Dalam Lumbanturoan (2010) dari hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif pada keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia provinsi-provinsi di Indonesia. Pradnyadewi (2017), Yasa dan Arka (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan positif signifikan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini pula sejalan dengan yang dinyatakan oleh Anggraini dan Luthfi (2013) dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dan bersifat positif terhadap IPM. Suwandi (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan di Papua Barat. Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Kerangka Konseptual Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode analisis jalur (*Path Analysis*) merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori, selain itu pula digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening (Utama, 2012:159).

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- Y_1 = Pertumbuhan ekonomi
- Y_2 = IPM
- $\beta_{1,2,3,4,5}$ = koefisien regresi atau slope
- X_1 = Kemandirian keuangan daerah
- X_2 = Investasi
- e_i = variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran perhitungan nilai minimum dan maksimum, rata-rata serta standar deviasi sehubungan dengan penelitian pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan metropolitan SARBAGITA. Analisis deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada data panel 13 tahun dari kawasan SARBAGITA (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan) sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif Kemandirian Keuangan Daerah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

| Descriptive Statistics | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Kemandirian Keuangan Daerah | 5 2 | 13.60 | 99.12 | 46.0508 | 25.39398 |
| Investasi | 5 2 | 166431.0 0 | 7180811.0 0 | 2307397.211 5 | 1713449.3846 7 |
| Pertumbuha n Ekonomi | 5 2 | 4.73 | 8.14 | 6.4967 | .82729 |
| IPM | 5 2 | 69.27 | 82.58 | 74.7637 | 3.34598 |
| Valid N (listwise) | 5 2 | | | | |

Pada Tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa banyaknya data yang digunakan sejumlah 52. Pertama, variabel X_1 yaitu kemandirian keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 13,60 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 99,12 dengan nilai rata-rata sebesar 46,0508. Standar deviasi pada variabel kemandirian keuangan daerah sendiri yaitu sebesar 25,39396. Kedua, variabel X_2 yaitu investasi memiliki nilai minimum sebesar 166.431 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 7.180.811 dengan nilai rata-rata sebesar 2.307.397,21. Standar deviasi pada variabel kemandirian keuangan daerah sendiri yaitu sebesar 1.713.449,38. Ketiga, variabel Y_1 yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 4,73 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 8,14 dengan nilai rata-rata sebesar 6,4967. Standar deviasi pada variabel kemandirian keuangan daerah sendiri yaitu sebesar 0,82729. Keempat, variabel Y_2 yaitu kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM

memiliki nilai minimum sebesar 69,27 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 82,58 dengan nilai rata-rata sebesar 74,7637. Standar deviasi pada variabel kemandirian keuangan daerah sendiri yaitu sebesar 3,34598.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan metropolitan SARBAGITA. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square* = OLS) dengan menggunakan program SPSS terhadap model persamaan.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengujian struktur pertama yaitu melihat bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah dan investasi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti setiap kenaikan satu persen tingkat kemandirian keuangan daerah menyebabkan penurunan satu persen pada pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti setiap kenaikan satu juta rupiah pada investasi

menyebabkan peningkatan satu persen pada pertumbuhan ekonomi. Maka model persamaan regresi 1 dapat disajikan sebagai berikut :

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,172} = 0,909$$

$$\hat{Y}_1 = -0,336 X_1 + 0,343 X_2 + 0,909$$

Keterangan :

- \hat{Y}_1 = pertumbuhan ekonomi
- X_1 = kemandirian keuangan daerah
- X_2 = investasi
- e_1 = variabel pengganggu

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM.

Hasil pengujian kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,151 > 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian variabel investasi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan signifikansi sebesar $0,655 > 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada hasil pengujian variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini berarti setiap kenaikan satu persen pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan satu persen pada kesejahteraan masyarakat. Maka model persamaan regresi 2 dapat disajikan sebagai berikut :

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,364} = 0,797$$

$$\hat{Y}_2 = 0,184 X_1 + 0,057 X_2 + 0,599 Y_1 + 0,797$$

Keterangan :

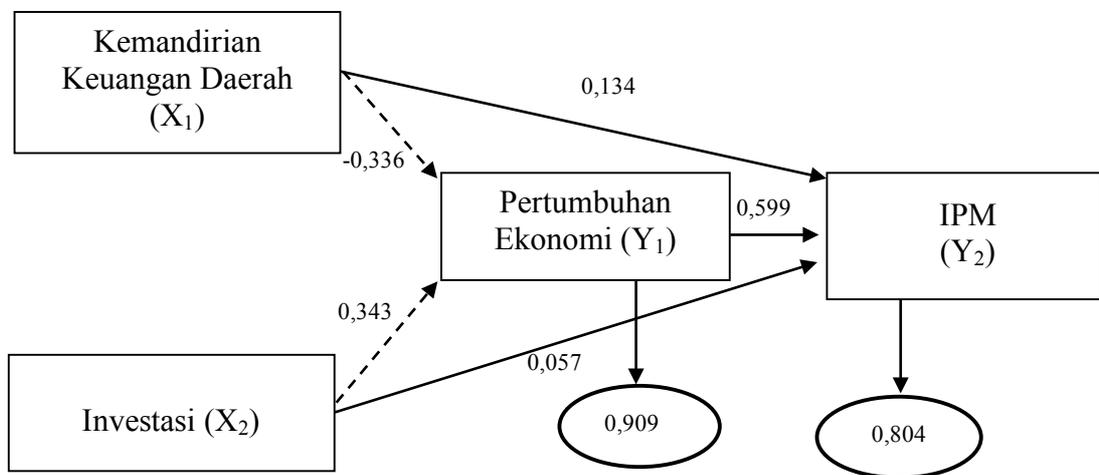
\hat{Y}_2 = IPM

Y_1 = pertumbuhan ekonomi

X_1 = kemandirian keuangan daerah

X_2 = investasi

e_2 = variabel pengganggu



Gambar 4 Diagram Hasil Analisis Jalur

Hasil Pengujian

1) Pengujian pengaruh langsung

a) Pengaruh langsung kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kawasan SARBAGITA.

Nilai *standardized coefficient beta* yaitu sebesar -0,336 yang diperoleh melalui perhitungan melalui program SPSS dan nilai probabilitas sebesar 0,016 < 0,05 ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya kemandirian keuangan

daerah (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Hubungan negatif antara variabel kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini berarti pada kawasan SARBAGITA tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih termasuk kedalam pola konsultatif, dimana belanja modal pada kawasan SARBAGITA rata-rata masih rendah yaitu dibawah 50% dari belanja daerah yang dilaksanakan. Penurunan pengalokasian anggaran untuk belanja modal salah satunya disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah, sehingga APBD sebagian besar dialokasikan untuk keperluan belanja tidak langsung (Badrudin, 2011). Selain dilihat dari pengeluaran pemerintahnya, dalam alokasi pendapatan pemerintah untuk pendapatan pada transfer pemerintah pusat baik DAU ataupun DAK masih cenderung tinggi.

b) Pengaruh langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kawasan SARBAGITA.

Nilai *standardized coefficient beta* yaitu sebesar 0,343 yang diperoleh melalui perhitungan melalui program SPSS dan nilai probabilitas sebesar 0,014 < 0,05 ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya investasi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Hubungan positif antara variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini berarti pada kawasan SARBAGITA investasi digunakan untuk pembentukan modal dalam jangka panjang salah satunya dalam perbaikan infrastruktur daerah sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Sholiah (2014), Paramita (2015) dan Danawati (2016), dan Taufik,dkk

(2014), menyatakan bahwa investasi pemerintah pada modal fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi. Selain itu pula, investasi sebagai salah satu komponen penting sebagai salah satu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*Sustainable Development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang digunakan untuk pembangunan ekonomi dalam kegiatan-kegiatan produksi disemua sektor ekonomi, dan untuk kegiatan pembangunan itu diperlukan.

c) Pengaruh langsung kemandirian keuangan daerah terhadap IPM pada kawasan SARBAGITA.

Nilai *standardized coefficient beta* yaitu sebesar 0,134 yang diperoleh melalui perhitungan melalui program SPSS dan nilai probabilitas sebesar 0,151 > 0,05 ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya kemandirian keuangan daerah (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2). Hubungan tidak signifikan antara variabel kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini, yang berarti antara kenaikan tingkat kemandirian keuangan daerah tidak memberikan dampak terhadap kenaikan ataupun penurunan tingkat IPM di kawasan SARBAGITA, hal ini disebabkan oleh tingkat kemandirian keuangan daerah pada kawasan SARBAGITA yang termasuk kedalam pola konsultatif dimana masih ada campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerahnya sehingga penggunaan dana dalam pemeliharaan peningkatan pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena masih cenderung dialokasikan ke dalam pos belanja operasi salah satunya untuk

menunjang pembiayaan PNS di setiap kawasan SARBAGITA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2017), Handayani dan Sriyunianti (2016) bahwa kinerja keuangan yang ada di Sumatra bagian tengah utamanya pada variabel kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena pengaokasian dana untuk pelayanan publik belum diberikan secara maksimal.

d) Pengaruh langsung investasi terhadap IPM pada kawasan SARBAGITA.

Nilai *standardized coefficient beta* yaitu sebesar 0,057 yang diperoleh melalui perhitungan melalui program SPSS dan nilai probabilitas sebesar 0,655 > 0,05 ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya investasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2). Hubungan tidak signifikan antara variabel investasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini berarti Investasi yang terjadi di Provinsi Bali tak terlepas pada kawasan SARBAGITA sebagian besar adalah investasi portofolio yaitu seperti obligasi dan saham yang menyebabkan investasi untuk pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Awandari dan Indrajaya (2016) menyatakan dalam penelitian yang dilakukan bahwa variabel investasi memberikan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, hal tersebut diindikasikan karena pergeseran investasi yang terjadi di yang pada awalnya dari bidang padat karya menjadi

padat modal sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakatnya.

e) Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kawasan SARBAGITA.

Nilai *standardized coefficient beta* yaitu sebesar 0,599 yang diperoleh melalui perhitungan melalui program SPSS dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2). Hubungan positif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini berarti pertumbuhan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan SARBAGITA, selain itu pula dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi akan memberikan kesempatan lebih besar masyarakat untuk meningkatkan pengeluarannya pada bidang kesehatan dan pendidikan sehingga dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap kesejahteraannya dalam jangka panjang (Rosita dan Sutrisna, 2018). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pradnyadewi (2017), Yasa dan Arka (2015), Anggraini dan Luthfi (2013), dan Suwandi (2016) yang menyatakan hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif pada keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia provinsi-provinsi di Indonesia.

2) Pengaruh Tidak Langsung

a) Pengaruh tidak langsung kemandirian keuangan daerah terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(2,423^2)0,004^2 + (0,011^2)0,512^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 0,0112$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menggunakan nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}}$$

$$z = \frac{(0,011)(2,423)}{0,0112}$$

$$z = 2,379$$

Oleh karena z hitung sebesar 2,379 lebih besar dari 1,96 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel intervening dalam kemandirian keuangan daerah (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) di kawasan SARBAGITA, atau dengan kata lain kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil variabel pertumbuhan ekonomi sebagai intervening kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2009) yang menyatakan desentralisasi fiskal berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan

ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga sejalan dengan teori Oates (1993) dalam Aminuddin (2017) mengenai desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

b) Pengaruh tidak langsung investasi terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(2,423^2)0,000^2 + (1,654E - 7^2) 0,512^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0,00077$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menggunakan nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

$$z = \frac{(1,654 E - 7)(2,423)}{0,00077}$$

$$z = 4,73254$$

Oleh karena z hitung sebesar 4,73254 lebih besar dari 1,96 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel intervening dalam investasi (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) di kawasan SARBAGITA, atau dengan kata lain investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masiku,dkk (2017) di Kabupaten Kutai Barat yang

menyatakan bahwa investasi pertambangan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui PDRB, adanya investasi tersebut akan memberikan peningkatan terhadap PDRB per kapita sehingga memberikan peningkatan penerimaan pada daerah yang nantinya akan berimbas pada peningkatan IPM mengingat peningkatan kualitas IPM akan semakin memungkinkan dengan adanya peningkatan PDRB.

Tabel 4 Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM

| Hubungan Variabel | Pengaruh | | Total |
|-------------------|----------|---------------------------|--------|
| | Langsung | Tidak Langsung Melalui Y1 | |
| X1 → Y1 | -0,336 | | -0,336 |
| X1 → Y2 | 0,134 | -0,201 | -0,067 |
| X2 → Y1 | 0,343 | | 0,343 |
| X2 → Y2 | 0,057 | 0,205 | 0,262 |
| Y1 → Y2 | 0,599 | | 0,599 |

Keterangan :

Y₂ = IPM

Y₁ = pertumbuhan ekonomi

X₁ = kemandirian keuangan daerah

X₂ = investasi

Pada Tabel 2 diatas dapat dijelaskan pengaruh secara langsung variabel kemandirian keuangan daerah (X₁) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y₁) sebesar -0,336, hal ini berarti secara langsung sebesar 33,6 persen kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan bila dilihat pengaruh secara tidak langsung variabel kemandirian keuangan daerah terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -0,201, nilai tersebut berarti

sebesar 20,1 persen kemandirian keuangan daerah mempengaruhi IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Pada variabel X_2 yaitu investasi berpengaruh secara langsung sebesar 0,343 terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga sebesar 34,3 persen variabel investasi dapat dikatakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengaruh secara tidak langsung variabel investasi terhadap IPM yaitu sebesar 0,205, hal ini berarti sebesar 20,5 persen variabel investasi mempengaruhi IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Pengaruh langsung variabel pertumbuhan ekonomi terhadap IPM yaitu sebesar 0,599, hal ini berarti sebesar 59,9 persen variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap IPM.

Implikasi Hasil Penelitian

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan konsep dimana melihat besar kecilnya transfer fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada kawasan SARBAGITA tingkat kemandirian keuangan daerah ini perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang dapat dilakukan misalnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih ditekankan pada kegiatan perekonomian dan peningkatan mutu SDM yang ada baik melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan ataupun sarana prasarana untuk mencapai hal tersebut sehingga nantinya selain pertumbuhan ekonomi yang baik tentunya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal tentu belum memberikan dampak yang berarti pada daerah tersebut sehingga daerah yang memiliki potensi perlu suatu dorongan dari pihak lain untuk mengembangkan daerahnya salah

satunya melalui investasi baik melalui pemerintah ataupun sektor swasta. Investasi ini memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi pada kawasan SARBAGITA, namun belum dapat memebrikan dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah SARBAGITA diharapkan dapat mengelola investasi yang ada baik untuk peningkatan kualitas SDM, pembukaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang ada serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih terjamin.

SIMPULAN

- 1) Kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif (signifikan) dan investasi berpengaruh positif (signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Kemandirian keuangan daerah dan investasi tidak berpengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif (signifikan) terhadap IPM.
- 3) Kemandirian keuangan daerah dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Akudugu, Jonas Ayaribilla. (2012). *Accountability in local Government revenue management: who does what?. Journal of Sustainable Development*. 2(2).
- Ali, Hasnah, Er, A.C., Ahmad, A.R., Lyndon, N., Ahmad, Sanep. 2013. Analysis of the Impact of Foreign Investment on Regional Disparities: A Case of Malaysia. *Asian Sosial Science*.9(14). Halaman: 209-218.
- Amalia, Firda Rizky Dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3 (6) : 257-264

- Aminuddin, Muzdhalifa Rukmayana. (2017). Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku. *Tesis*. Universitas Brawijaya.
- Ananda, Erwinda Agnesia Voni. 2017. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan*. Universitas Sebelas Maret.
- Ani , Ni Luh Nana Putri, Dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3). Hal 481-497
- Anggraini, Rinda Ayun Dan Luthfi Muta'ali. 2013. Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(3). Hal 233-242
- Antonescu, Daniela. 2010. The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration. *Scientific Researcher*, 2(40). Halaman:161-183.
- Awandari ,Luh Putu Putri Dan I Gst Bgs Indrajaya. 2016. Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12).
- Bendesa. I Komang Gde. (2014). Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berkarakter. *Jurnal Piramida*. 10(1), 1-7.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2017. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2016. *Bali Dalam Angka*. Denpasar : BPS
- . 2017. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2016 (Miliar Rupiah). *Bali Dalam Angka*. Denpasar : BPS
- Badrudin, Rudy. (2011). Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth and Welfare. *I Economic Journal of Emerging Market*, 3(3), 211-223.
- Danawati, Sri, dkk. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*,5(7).

- Dalamagas, Basil. (2010). Public Sector and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32,277-288.
- Dewi, Ayu Krisna dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan daerah Dan Pertumbuhan ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1). pp.32-40
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Fleisher, Belton., Haizheng Li and Min Qiang Zhao. (2010). Human Capital, Economic Growth and Regional Inequality in China. *Journal of Development Economics*, 92 (2),215-231.
- Garibaldi, Muhammad dan Paidi Hidayat. 2014. Analisis Hubungan Ipm Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(9). pp. 562-572
- Handayani, Desi dan Fera Sriyunianti. 2016. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kcamatan/Kota Di Sumatera Bagian Tengah. *Jurnal National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*. Politeknik Negeri Padang.
- Hariwan, Peggy dan Ayu Swaningrum. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Journal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1), 72-82.
- Irawan, Andi. 2015. Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1): 148-149.
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016. Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*. 6(2). Halaman: 154-272.
- Kacaribu, Rosinta Dewi. 2013. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Di Provinsi Papua. *Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*.
- Kaur, Manjinder. (2016). Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 8(2), 2015-212.
- Kusuma , Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1). Hal 1 - 11
- Lindblad, J. Thomas. (2015). Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51 (2), 217-273.

- Maccari, Norma. 2014. Sustainable Human Development: Human Development Index and the Environment. *Internasional Journal of Sustainable Human Developmet*. 2 (1). pp.29-34
- Masiku, Yakin, dkk. 2017. Pengaruh Investasi Pertambangan dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Forum Ekonomi*. 19 (1). Hal :92-98.
- Miranti, Riyana., Alan Duncan, and Rebecca Cassells. 2014. Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studie*, 50(3), 461-482.
- Paramita , Anak Agung Istri Diah, dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2015. Pengaruh Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi erta Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4 (10).
- Pisano, Umberto., Lisa Lange, Gerald Berger and Markus Hametner. 2015. The Sustainable Development Goals (SDGs) and Their Impact on the European SD Governance Framework. *ESDN Quarterly Report*, No.35.
- Pradnyadewi, Diah dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2017. Pengaruh Ipm, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2). Hal 255-285.
- Ranis G. 2004. Human Development and Economic Growth. *Center Discussion Paper* No.887.
- Rosita, Ida Ayu Putu Mega dan I Ketut Sutrisna. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*. 7 (7).
- Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh *Gini Ratio*, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Jurnal Piramida*, 10(1), 45-55.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. The Relationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidance from Sunda. *International Business Research*. 5(8). Hal: 40-46.
- Sari, Mustika. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Solok. *Skripsi Universitas Andalas Payakumbuh*.

- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 10 (1). Hal : 103-124.
- Sholilah, Dyah Hapsari Amalina. 2014. Pertumbuhan Inklusif : Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah Di Indonesia. *Tesis Institut Pertanian Bogor*.
- Suciati, Kembar dan Jayastra. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. *Buletin Studi Ekonomi*. 20(2).
- Suwandi. 2016. The Influence of Economic Growth on Poverty, Investment, and Human Development Index in Fak, Fak District, West Papua Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. 7(3). Halaman: 69-72.
- Sulistyowati, Niken.,dkk. 2010. Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*,6(2). Hal 158-170
- Taufik, Muhammad., dkk. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2). Hal 90-101
- Utama, Suyana. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Wahyuningsih. 2017. Millenium Developpment Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 11(3). Halaman: 390 - 399
- Wiagustini, Ni Luh Putu,dkk. 2017. Potensi Pengembangan InvestasiBerbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Denpasar.*Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 2(10).
- Yasa, Oka Artana dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Journal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1). Halaman: 63-71.
- Yanthi, Cokorda Istri Dian Purnama dan A.A.I.N.Marhaeni. 2015. Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*. 11(2) Hal :68-75.
- Zouhaier, Hadhek. (2012). Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4(2), 152-162.